

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)

The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government Institution (A Study in Regional Work Unit of Bandung City)

Ferina Anggraeni

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ferina.anggraeni.amp16@polban.ac.id

Suji Abdullah Saleh

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: suji.abdullah@polban.ac.id

Abstract: *The budget function as an instrument of public accountability for the management of public funds. To support this, the government needs a good approach in order to achieve predetermined goals. Performance-based budgets are used by the government as a reference in preparing budgets to achieve performance goals and targets and to meet performance accountability. This study aims to determine how the implementation of performance-based budgeting and performance accountability of government agencies in Bandung City Regional Work Units, as well as to analysis the effect of implementing performance-based budgets on the performance accountability of government agencies. The research method used in this research is quantitative. The sampling technique used purposive sampling. The sample was selected based on certain criteria, namely 26 SKPDs with the status of regional offices and regional agencies in Bandung City. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the planning or budgeting sector and the field of finance or accounting, the number of respondents in this study was 70 people. The method of analysis in this study uses simple linear regression analysis with the help of SPSS 24 Software. The results show that the implementation of performance-based budgets has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies.*

Keywords: *Performance-based budgeting, Accountability of the Performance of Government Agencies.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara telah menetapkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatannya dan kegunaannya oleh masyarakat. Seiring dengan reformasi pemerintahan di Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga mengharuskan pemerintah untuk dapat memenuhi akuntabilitas tidak hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja dalam rangka pengelolaan dana

dengan sistem desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memang merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah. Terlebih saat ini, kinerja instansi pemerintah telah banyak mendapat sorotan dari masyarakat terkait dengan manfaat yang dirasakan dari pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.

Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya adalah apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD. Dari data yang didapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014-2018, selama kurun waktu lima tahun Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp103.866.290.317, pada tahun 2016 sebesar Rp145.199.859.715, dan pada tahun 2018 sebesar Rp174.451.669.705,40. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah lebih besar dari pendapatan yang diterimanya. Kontribusi terbesar dari pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bandung berasal dari pajak daerah yang memberikan kontribusi mencapai 81% (galamedianews.com). Dalam realisasinya pada tahun 2015, 2016, dan tahun 2018 target pencapaian pajak daerah untuk pendapatan daerah tersebut tidak tercapai sedangkan pengeluaran belanja yang dilakukan lebih besar. Hal ini mencerminkan dana yang ada masih belum dikelola dengan optimal serta belum adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana tersebut.

Kaitan antara anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diteliti antara lain oleh Riliya (2015), Muchlisa (2017), dan Nurrizcky (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Surya (2017) dan Utami (2016) menunjukkan bahwa sub variabel penerapan anggaran berbasis kinerja masih ada yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hubungan antar variabel ini masih perlu diteliti karena masih ditemukannya perbedaan hasil.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung dan bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada penerapan anggaran berbasis kinerja, capaian kinerja, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.

2. Kajian Pustaka

2.1. Anggaran Berbasis Kinerja

Mahmudi (2016:69) mendefinisikan bahwa anggaran berbasis kinerja yaitu: “Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.”

Setiap dana yang dianggarkan untuk setiap pelayanan publik yang dilakukan harus terukur secara jelas indikator kerjanya yang direpresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam anggaran berbasis kinerja terdapat prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya dapat terlaksana secara maksimal, menurut Halim (2014:178) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja.

2.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa:

“Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.”

Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Menurut Elwood (1993) dalam Mahmudi (2010:9) dimensi tersebut adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

2.3. Kerangka Pemikiran

Anggaran berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat terkendali dan digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung peningkatan akuntabilitas sektor publik (Nurrizcky, 2017). Maka, keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dalam pernyataan Bastian (2006:54) yaitu upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Selain itu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan antara lain oleh Muchlisa (2017) dan Abdullah (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang disusun secara periodik.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan untuk penelitian ini adalah: “Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.”

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang berjumlah 63 SKPD. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu 26 SKPD yang berstatus dinas daerah dan badan daerah karena merupakan unsur pelaksana dan unsur penunjang dalam melaksanakan urusan pemerintahan dengan azas otonomi dan tugas pembantuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek berupa opini, sikap, dan karakteristik responden yang menjadi subyek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan metode survey yang dibagikan kepada bagian perencanaan atau anggaran dan bagian keuangan atau akuntansi pada setiap SKPD.

Analisis data dengan mentransformasikan data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan teknik MSI. Uji kualitas data kuesioner menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis deskriptif. Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana karena hanya ada satu variabel independen. Kemudian uji determinasi (R²) dan uji hipotesis (uji t).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer yaitu berupa kuesioner yang disebar kepada 26 SKPD Kota Bandung. Jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 104 kuesioner, dengan pertimbangan setiap SKPD masing-masing mendapatkan 4 kuesioner yang diajukan kepada bidang perencanaan atau anggaran dan bidang keuangan atau akuntansi. Dari seluruh kuesioner yang disebar, sebanyak 5 kuesioner tidak dikembalikan oleh responden dan 29 kuesioner gagal untuk dioalh.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari tiap variabel yang diteliti. Hasil dari analisis deskriptif ini diperoleh berdasarkan perhitungan jawaban responden yang dihitung dari skor setiap pernyataan, kemudian dikelompokkan dengan menggunakan nilai batas kategori, untuk variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden mengenai Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Dimensi	Skor Tertinggi	Skor Terendah	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	303	295	5	Rentang skor	56
				Tidak Baik	70-126
				Kurang Baik	127-183
				Cukup Baik	184-240
				Baik	241-297
			Sangat Baik	298-350	
Akumulasi skor penilaian variabel anggaran berbasis kinerja				298,8	
Kategori jawaban responden terhadap variabel penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerinrah Kota Bandung adalah Sangat Baik					

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Sedangkan untuk nilai batas kategori untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden mengenai Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dimensi	Skor Tertinggi	Skor Terendah	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	303,5	297	5	Rentang skor	56
				Tidak Baik	70-126
				Kurang Baik	127-183
				Cukup Baik	184-240
				Baik	241-297
				Sangat Baik	298-350
Akumulasi skor penilaian variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				300,3	
Kategori jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bandung adalah Sangat Baik					

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa akumulasi skor untuk variabel penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 298,8 termasuk kedalam kategori sangat baik. hal ini menggambarkan bahwa secara umum penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah kota bandung sudah berjalan dengan baik terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Untuk disiplin anggaran sudah baik namun masih perlu ditingkatkan agar penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota bandung dapat terlaksana secara maksimal.

Untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akumulasi skornya adalah 300,3 termasuk kedalam kategori sangat baik. hal tersebut menggambarkan bahwa secara umum akuntabilitas pada pemerintah daerah kota bandung sudah dilaksanakan dengan baik terutama dalam akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan akuntabilitas program sudah baik namun perlu ditingkatkan terutama dalam pembuatan program alternative yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,235 dan nilai r_{hitung} dari semua item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Croanbach's Alpha untuk variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X) adalah 0,842 dan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah 0,872. Hasil perhitungan menunjukkan reliabel apabila nilai Croanbach's Alpha $> 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner untuk variabel X dan Y reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas, hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan pendekatan *Exact* menunjukkan nilai 0,054 dimana angka tersebut lebih besar dari signifikansi 0,05 sehingga dapat dinyatakan data terdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, pada grafik *scatterplot* tidak terjadi pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 yang berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi, Koefisien Determinasi dan Pengujian Hipotesis

Adapaun hasil analisis regresi menggunakan *Software SPSS 24* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Variabel/Konstanta/Koefisien	P-Value	t _{hitung}	t _{tabel}
1	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0,000	10,462	1,99547
2	Konstanta (a)	5,070		
3	Koefisien Regresi (b)	0,856		
4	Koefisien Determinasi (R ²)	0,617		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 5,070 + 0,856X + e$$

Dari hasil tersebut dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 5,070 yang berarti bahwa jika variabel bebas atau penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai 0 (nol) maka nilai konsisten variabel terikat atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 5,070.
2. Nilai koefisien regresi (b) yang diperoleh sebesar 0,856 yang berarti bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,856. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Nilai R square (R²) yang diperoleh adalah sebesar 0,617 yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 61,7% atau dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 61,7% dan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : $\beta \leq 0$ tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung

H₁ : $\beta > 0$ terdapat pengaruh signifikan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa t_{tabel} dengan signifikansi (α) 0,05 df (N-2) = (70-2) = 68 sebesar 1,99547. Dari pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} variabel penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 10,462 lebih besar dari t_{tabel}. Selain itu dapat diketahui bahwa nilai signifikansi penerapan anggaran berbasis kinerja 0,000 < 0,05, karena t_{hitung} > t_{tabel} maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data, diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara keseluruhan telah berjalan dengan baik karena termasuk kedalam kategori sangat baik. demikian pula dengan masing-masing indikator sebagian besar termasuk kedalam kategori sangat baik. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan disusun dengan pendekatan kinerja termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan disiplin anggaran termasuk kedalam kategori baik. Dalam satu periode anggaran, dana yang dialokasikan pada masing-masing SKPD sudah sesuai dengan proporsinya masing-masing dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan

setiap pegawai melakukan tugasnya dalam pemberian pelayanan publik secara professional.

Namun hal ini berbeda dengan fenomena penelitian yang menyebutkan bahwa masih belum adanya penggunaan dana secara optimal, efektif dan efisien. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun mengalami defisit sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Hal tersebut dikarenakan dalam realisasinya target pendapatan pada tahun tersebut tidak tercapai. Masih diperlukannya peningkatan dalam hal disiplin anggaran agar pengeluaran dapat lebih terkendali sesuai dengan ketersediaan sumber pendapatan. Selaras dengan prinsip disiplin anggaran menurut Halim (2014:178) bahwa pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, maka target pendapatan yang sudah direncanakan sejak awal seharusnya dapat tercapai, karena target tersebut sudah diukur dan ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Selain tidak tercapainya target pendapatan, faktor lain yang menyebabkan anggaran tersebut defisit yaitu masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Selain itu perbedaan tersebut kemungkinan dikarenakan indikator pengukuran yang digunakan berbeda dalam penelitian ini.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data, diketahui bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kota Bandung secara keseluruhan telah berjalan baik, karena termasuk kedalam kategori sangat baik. Demikian pula dengan masing-masing indikator, sebagian besar menunjukkan kategori sangat baik.

Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan akuntabilitas program termasuk kedalam kategori baik. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya baik dari segi program dan kegiatan maupun hasilnya dapat berdampak pada akuntabilitas program suatu instansi. Selain itu, hal ini dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung kemungkinan masih belum sepenuhnya menerapkan pembuatan program alternatif untuk pencapaian target atau tujuannya. Pembuatan program alternative dengan biaya minimal ini perlu dipertimbangkan agar pencapaian target dan tujuan organisasi lebih efisien dan efektif serta hasilnya tetap optimal.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). sebagaimana ditunjukkan dalam model persamaan regresi yaitu: $Y = 5,070 + 0,856X + \epsilon$, maka besarnya pengaruh tersebut adalah 85,6% yang berarti bahwa apabila variabel lain konstan maka setiap penambahan atau peningkatan intensitas penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 85,6%. Selanjutnya taraf signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05, maka variabel penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $10,462 > 1,99547$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung. Kemudian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,617 yang berarti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung dapat dipengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 61,7% dan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Muchlisa (2017) yaitu bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan sebesar 51,5% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kemudian dalam hasil penelitian Nurrizcky (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 83% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain itu penelitian Riliya (2015) menunjukkan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 69,5% dan Abdullah (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa

penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 64,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting dalam lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Anggaran dapat digunakan sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik. Adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan hasil yang hendak dicapai maka akan memudahkan terciptanya transparansi sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Dengan begitu, akan terpenuhi pula akuntabilitas publik terkait kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah. Karena, akuntabilitas publik juga menekankan pemberian informasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik (Mahmudi, 2010:23). Hal ini sejalan dengan pernyataan Bastian (2006:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan khususnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala yaitu dalam kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Dalam penyusunannya pemerintah daerah Kota Bandung sudah memperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan disusun dengan pendekatan kinerja yang termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk disiplin anggaran termasuk kedalam kategori baik dan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat maksimal.
2. Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung sudah dapat dikatakan sangat baik. Untuk dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial sudah termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas program sudah termasuk kedalam kategori baik namun masih perlu ditingkatkan lagi agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat semakin maksimal.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung. Besarnya pengaruh tersebut adalah 61,7% dan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung agar manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi lebih optimal, disarankan untuk berupaya terus meningkatkan intensitas penerapannya. Walaupun kategori jawaban responden sudah sangat baik, sebaiknya Pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan pencapaian target untuk program dan kegiatan yang menjadi acuan kinerja dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, terutama harus lebih diperhatikan lagi kesesuaian pada saat pelaksanaan dengan perencanaannya agar pencapaian kinerja yang dihasilkan dapat lebih maksimal dan konsisten setiap tahunnya. Selain itu disiplin anggaran dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan, dengan begitu pengeluaran yang dilakukan dalam menunjang kinerja pemerintah akan dapat lebih terkendali dan sesuai dengan ketersediaan pendapatannya. Kemudian untuk akuntabilitas program, perlu dipertimbangkan untuk pembuatan program alternatif dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan begitu instansi pemerintah akan dapat menghasilkan kinerja secara optimal dalam pencapaian target dalam mewujudkan visi misinya.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengubah populasi penelitian dan menambahkan variabel penelitian lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti perencanaan strategis agar dapat terlihat konsistensi hasilnya dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zachari dan Cyntia. 2018. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh*. Jurnal Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. ISSN-2310-8380. VOL 7, No. 1
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *AKuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muchlisa, Ana. 2017. *“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”*. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nurrizcky, Erni. 2017. *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)”*. Skripsi. Bandung: POLBAN.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014)*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Ridwan, 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Riliya, Hana. 2015. *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon)”*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, Ema. 2019. PAD Kota Bandung terus meningkat. <https://www.galamedianews.com/?arsip=208751&judul=ema-pad-kota-bandung-terus-meningkat> [di akses 29 Januari 2019]
- Surya, Leni. 2017. *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”*. Artikel Ilmiah. Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengairan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Utami, Wilza. 2016. *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*. Artikel Ilmiah. Jambi: Universitas Jambi.